

IMPLEMENTASI PERAN DAN KONTRIBUSI PEMIMPIN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA BAGI MAHASISWA DI ERA PANDEMI

Farid Wajdi^{1*}
Syarifuddin Tundreng²
Zulfikar Putra³

^{1*,2,3} Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia

wajdikf83@usn.ac.id^{1*)}
tundreng.syarifuddin@gmail.com²⁾
zulfikar072021@gmail.com³⁾

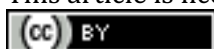
Kata Kunci: *Kebijakan pendidikan; kepemimpinan*

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan implementasi peran dan kontribusi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya yang memiliki otoritas kebijakan pendidikan era pandemi di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimana peran dan kontribusi Kemendikbud terkait kebijakan pendidikan di era pandemi? Karena kepemimpinan merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi (kelompok masyarakat) dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber terkait fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan dengan mengantisipasi pendidik dan peserta didik untuk bersekolah di rumah, menaati peraturan kesehatan, dan menjaga kesehatan, serta bantuan berupa kuota internet gratis, bantuan gaji pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terpenting juga ada penyesuaian uang UKT (SPP) bagi mahasiswa. Meski pendidik dan mahasiswa mengeluhkan sarana dan prasarana pembelajaran secara keseluruhan yang kurang memadai, terkendala jaringan internet dan masalah perekonomian keluarga.

Published by:



Copyright © 2022 The Author(s)
This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Manusia diberi tanggung jawab (amanat) untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Seorang pemimpin akan baik dan sukses jika memiliki kemampuan dan keterampilan dalam apa yang diembannya. Negara akan maju dan berhasil jika dipimpin dan dijalankan di bawah kepemimpinan manusia yang memiliki sumber daya manusia yang aktif, cakap, cerdas, dan memahami kepemimpinan yang diembannya yaitu dunia ketatanegaraan. Demikian pula dengan pendidikan, pendidikan akan berhasil, maju, baik, dan profesional jika dibimbing dan dilaksanakan di bawah kepemimpinan manusia (sumber daya manusia) yang kompeten, profesional, ahli, cerdas, dan menguasai dunia pendidikan. Suatu organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar pasti memiliki seorang pemimpin, tujuannya agar kepemimpinan yang diemban memiliki tujuan, arah, harapan, dan manfaat bagi semua orang.

Indonesia sebagai negara berkembang selalu berusaha untuk menghadapi dan bersaing dengan tantangan untuk menjadi negara Indonesia yang maju (Wajdi and Putra 2021). Tantangan lain yang harus dihadapi bangsa Indonesia, yakni terkait arus globalisasi dan berbagai isu terkait masalah lingkungan, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional, semuanya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu meresponnya (Winingsih 2016). Di era globalisasi yang berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendidikan dipaksa untuk menyesuaikan kemajuan agar tidak tertinggal dengan dunia lain (Yuliana and Raharjo 2019). Kemajuan pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak (Krisna et al. 2020). Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara melalui penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan melibatkan faktor internal dan eksternal di satuan pendidikan (Raharjo et al. 2018). Evaluasi sekolah pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kualitas sekolah dalam menjalankan tugasnya mendidik siswa (Asrijanty 2019).

Alam merupakan salah satu tempat yang disediakan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk kehidupan makhluk, salah satunya adalah manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan terus mengalami perkembangan dan kemajuan dalam upaya menjaga habitatnya sebagai makhluk yang cerdas dengan selalu melakukan inovasi dan kreativitas untuk menjawab dan menghadapi permasalahan dan tantangan global di dunia (Wajdi and Putra 2020). Salah satu faktor kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Gagasan pendidikan sebagai batu loncatan untuk mengubah realitas (Freire 2007). Perubahan ini juga harus terjadi di lembaga-lembaga pemerintah, seperti rumah sakit, kantor pos, dan layanan publik lainnya, di mana pendidikan ini dapat menciptakan tuntutan rekonstruksi bangsa yang mampu (Freire 2008).

Pendidikan merupakan tonggak kemajuan suatu bangsa, negara maju menginginkan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terencana untuk mewujudkan potensi diri yang memiliki kekuatan spiritual-religius, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan belajar aktif dalam mengembangkan potensi diri (Sukayana et al. 2019). Pendidikan sebagai alat manajemen dalam membentuk perkembangan pribadi manusia

memegang peranan penting dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan (Wajdi 2021b).

Kepemimpinan merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap manusia sebagai makhluk sosial karena dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan. Dengan kepemimpinan, Anda dapat menentukan arah atau tujuan yang diinginkan dan bagaimana arah atau tujuan tersebut dapat dicapai. Kepemimpinan adalah istilah peran bagi seorang individu (seseorang) yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu kelompok (masyarakat) dalam mengelola dan mengarahkan tujuan yang ingin dicapai. Memfokuskan konsep kepemimpinan hanya pada empat komponen penting, yaitu 1) pengaruh; 2) proses; 3) masyarakat; dan 4) tujuan Bersama (Northouse 2021). Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan sangat kompleks dan memiliki banyak konsep (Thoha 2014).

Pemimpin mengutamakan faktor manusia, sedangkan manajer lebih memilih hal-hal yang tidak berhubungan dengan manusia, seperti administrasi (Santiari et al. 2020). Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan (Syam et al. 2020). Kepemimpinan sangat penting bagi suatu organisasi termasuk pemerintah kabupaten/kota (Pujiati et al. 2017). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (Robbins 2007). Kepemimpinan merupakan suatu proses sosial, di dalamnya terdapat interaksi yang saling mempengaruhi (Lestari 2016).

Kepemimpinan dalam pendidikan sangat penting karena kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan (Gaol 2017). Kepemimpinan pendidikan yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang berbasis nilai budaya dan agama serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan pada khususnya dan pada umumnya atas kemajuan-kemajuan yang dilakukan di luar sistem sekolah (Setiawan 2016). Pendidikan merupakan lembaga yang berperan dalam menanamkan nilai dan pengetahuan kepada peserta didiknya. Keberadaan pendidikan secara makro diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rekayasa sosial dan transformasi sosial budaya (Wahyuni 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, kepemimpinan adalah peran seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rangka mengarahkan, mengendalikan, dan meringankan beban agar prestasi dapat terlaksana dan tercapainya tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Pemimpin adalah perilaku individu yang memiliki ide-ide yang dapat memberikan pengaruh, inspirasi, motivasi, dan arahan dalam mencapai tujuan dan harapan banyak orang (bersama-sama). Sedangkan kepemimpinan adalah suatu kegiatan perilaku individu dalam mempengaruhi sekelompok orang atau sejumlah besar orang dengan kemampuannya berupa gagasan-gagasan untuk mencapai tujuan dan harapan bersama.

Peran dan kontribusi kepemimpinan di bidang pendidikan sangat dibutuhkan dalam berbagai keadaan terutama di era pandemi yang melanda secara global, termasuk salah satunya Republik Indonesia. Dengan peran dan kontribusi pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pendidikan, diharapkan mampu mengurangi beban pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Peran adalah kegiatan perilaku individu dalam melaksanakan rencana, strategi, kebijakan, keputusan, dan komunikasi tentang hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain perannya, pemimpin sebagai aktor dalam menjalankan kepemimpinannya juga sangat membutuhkan kontribusinya dalam menjawab dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Kontribusi adalah kegiatan perilaku individu dalam berpartisipasi dalam kebutuhan masyarakat.

Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan terselenggaranya pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Makawimbang 2012). Menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk wewenang yang digunakan sebagai sarana untuk meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya (Purwanto 2010). Menyatakan bahwa kepemimpinan adalah fenomena universal dan unik. Siapapun akan menunjukkan perilaku kepemimpinan ketika berinteraksi dalam format untuk mempengaruhi orang lain (Danim 2012). Pengetahuan semakin diakui sebagai aset penting organisasi. Paradigma terbaru adalah pengetahuan sebagai kekuatan. Oleh karena itu pengetahuan harus dikelola dan diciptakan dengan baik oleh organisasi (Praptowo et al. 2020). Tiga potensi yang sangat spektakuler dalam diri manusia, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Jika ketiga aspek tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal, maka apapun yang direncanakan manusia dalam menjalankan aktivitasnya akan berhasil (Tilome and Masaong 2014).

Peran merupakan aspek dinamis dari posisi (Soekanto 2009). Menyatakan bahwa peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu (Rivai 2004). Peran merupakan rangkaian kegiatan rutin yang muncul karena suatu jabatan (Thoha 2014). Menurut Narwoko, di antara fungsi peran tersebut, yaitu: 1) memberikan arahan dalam proses sosialisasi; 2) pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan; 3) dapat menyatukan kelompok atau komunitas; dan 4) mengaktifkan sistem kendali dan kendali, dalam rangka melestarikan kehidupan masyarakat (Narwoko, D., & Bagong 2006). Peran sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika ia menduduki suatu watak (posisi) dalam suatu struktur sosial (Suhardono 2016). Identitas Peran, ada sikap tertentu dan perilaku aktual yang sesuai dengan peran, dan yang memunculkan identitas peran. Berpendapat bahwa setiap posisi dalam struktur kelompok memiliki peran untuk menentukan perilaku yang diharapkan dari incumbent. Selain peran yang diharapkan, ada juga peran yang dirasakan dan peran yang diemban. Perceived Role adalah seperangkat perilaku yang menurut keyakinan seseorang harus dia lakukan karena kedudukannya, sedangkan peran yang dilakukan adalah perilaku yang benar-benar dilakukan orang tersebut (Matteson. 2014). Pengertian kontribusi secara umum adalah keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial dan ekonomi. Menurut (Ahira 2012), kontribusi adalah perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian berdampak positif dan negatif bagi pihak lain, kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, keuangan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut, peran adalah kegiatan perilaku individu dalam melaksanakan strategi, kebijakan, dan komunikasi hak dan kewajiban dalam tindakan perannya. Sedangkan kontribusi adalah kegiatan perilaku individu dalam berpartisipasi untuk kebutuhan orang lain.

Artikel ini memaparkan peran dan kontribusi pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak yang memiliki otoritas kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik. Menurut (Abidin 2012), kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Menyatakan bahwa kebijakan publik biasanya dibuat oleh pemerintah dan berdampak besar dan luas bagi masyarakat (masyarakat), misalnya kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dan ujian akhir nasional (UAN) (Sutapa 2008). Secara akademis, kebijakan publik merupakan bagian dari ilmu politik (Maskuri 2017). Proses analisis kebijakan merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik ini digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung yang disusun secara kronologis (Dunn 2017). Peran negara atau pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan berupa kebijakan perundang-undangan, negara bebas merumuskan dan menjalankan kebijakannya sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan (M. Solichin 2015). Kebijakan yang mengatur pendidikan memfasilitasi dan memberikan ruang bagi masyarakat pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan karakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional (Hastuti and Soehartono 2018). Kebijakan pendidikan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau penyelenggara di bidang pendidikan sebagai reaksi atas munculnya berbagai masalah pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat, serta pedoman tindakan dan solusi, serta inovasi dalam rangka mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah serta aktor lain yang bertanggung jawab atas pendidikan (Arwildayanto, A. Suling 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka kebijakan merupakan konsep rencana strategis untuk pengambilan keputusan. Kebijakan publik adalah tahapan konsep suatu rencana (aturan/undang-undang) yang dirumuskan sebagai keputusan bagi masyarakat luas. Sedangkan kebijakan pendidikan merupakan hasil rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang (kementerian pendidikan dan kebudayaan) dalam mengatur bidang pendidikan sebagai pedoman (rujukan) agar pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran (sistem pendidikan). dengan baik, efektif, dan efisien.

Saat ini, sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Tentunya kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik harus diwujudkan dalam pembelajaran online tatap muka. Berbagai negara telah menerapkan social distancing yang dirancang untuk mengurangi interaksi antar manusia dalam komunitas yang lebih luas, di mana individu dapat terinfeksi tetapi belum teridentifikasi sehingga belum diisolasi (Wilder-Smith and Freedman 2020). Indonesia secara spontan menerapkan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah (Darmalaksana et al. 2020). Situasi ini membutuhkan solusi kepemimpinan yang telah menjadi tuntutan abad 21 (Wahyu and Mihardjo 2018). Hal itu dilakukan, dalam upaya menjaga kesehatan, serta mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus (pandemi) yang juga melanda Indonesia. Pandemi yang melanda dunia secara global saat ini mengubah sikap (perilaku) masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai warga negara di suatu wilayah (negara) mengharapkan kontribusi kebijakan seorang pemimpin dalam menghadapi realitas kehidupan. Peran dan fungsi seorang pemimpin dalam kepemimpinan dapat mengurangi beban hidup saat pandemi melanda. Pandemi yang melanda kehidupan manusia sangat terasa dan berdampak pada sektor-sektor penting sumber kehidupan manusia, seperti

kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik suka tidak suka, harus menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya sebagai pendidik dan peserta didik. Kebiasaan ini perlahan berubah, terutama di negara berkembang di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, khususnya di bidang pendidikan ketika mengalami masalah pembelajaran yang dialami oleh pendidik dan peserta didik di semua jenjang (sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi). Sehingga diperlukan peran dan kontribusi pemimpin terhadap kebijakan pendidikan yang merupakan amanah dari jabatan yang diembannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pemimpin di Indonesia terhadap peran dan kontribusi kebijakan pendidikan di era pandemi.

Metode

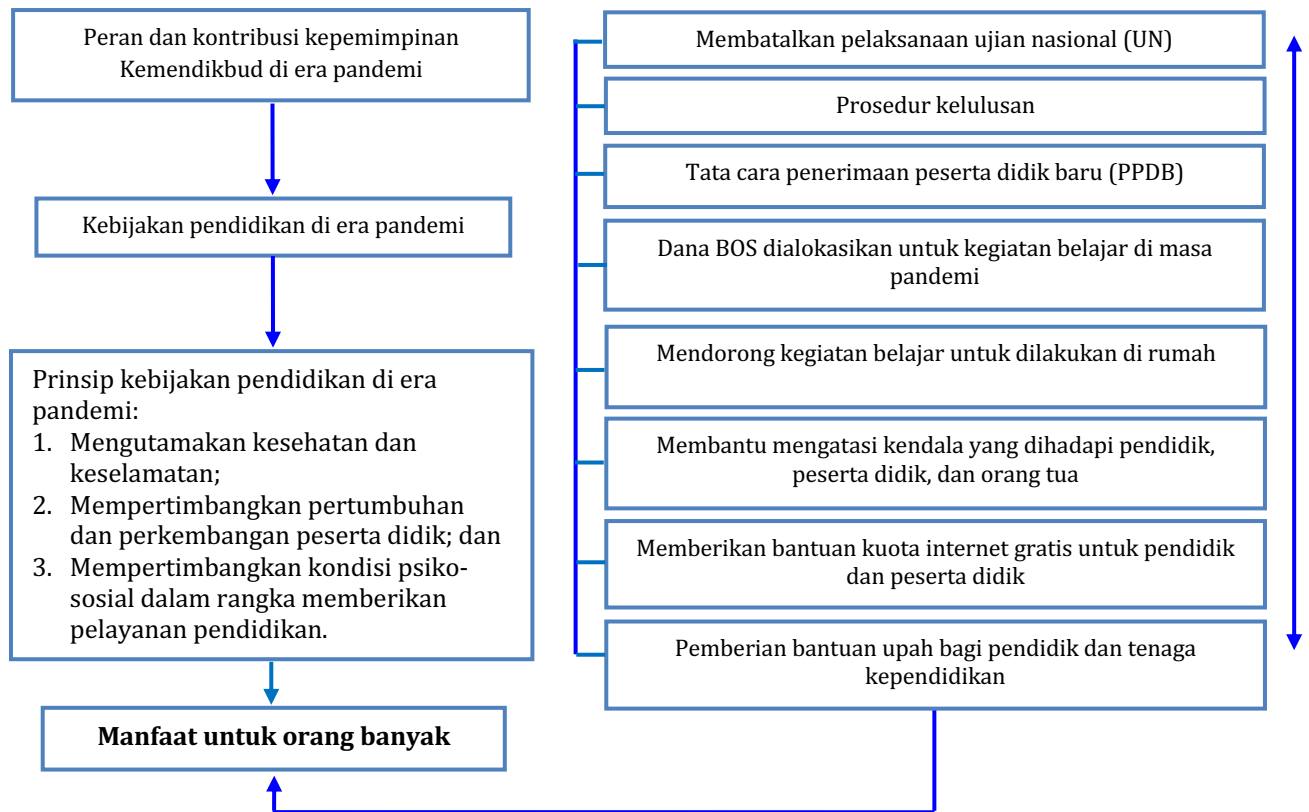
Metode penelitian dalam naskah artikel ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai bahan seperti buku, jurnal (artikel ilmiah), berita online dan offline, dan informasi lain yang diperlukan terkait dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah peran dan kontribusi pimpinan pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan terhadap kebijakan pendidikan yang dilakukan di Indonesia pada masa pandemi. Peneliti menganalisis data melalui bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan sumber data yang relevan dengan mengandalkan buku-buku perpustakaan, artikel jurnal, berita, dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Manusia dalam sejarah peradabannya selalu mewariskan ilmu kepada anak-anaknya. Kepedulian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam peran dan kontribusinya terhadap kebijakan pendidikan di era pandemi merupakan kekuatan yang mendesak dan mendasar. Hal ini menjadi tantangan bagi seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan nasional.

Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk terbesar dalam mengembangkan pembelajaran online di era pandemi karena guru dan siswa dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Dan ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir kebodohan anak bangsa dari belajar dengan sistem teknologi. Implikasi pendidikan di era globalisasi dan era pandemi harus memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi pendidik dan peserta didik.

Pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan di era pandemi membutuhkan strategi untuk mengatasi masalah pembelajaran. Sebab, dalam situasi pandemi, pendidik dan peserta didik dituntut untuk melakukan proses pembelajaran berbasis teknologi sebagai proses pembelajaran masa depan. Berdasarkan sumber data yang penulis peroleh dalam artikel ini, peran dan kontribusi pimpinan kementerian pendidikan dan kebudayaan di era pandemi terhadap kebijakan pendidikan dapat dilihat pada siklus berikut (Lihat gambar 1):



Gambar 1. Siklus kebijakan pendidikan Kemendikbud di era pandemi

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat membantu individu atau masyarakat dalam memecahkan setiap masalah kebutuhan. Pendidikan sebagai sarana untuk membentuk pribadi manusia memegang peranan penting dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang mampu menjalani, menghadapi, dan memecahkan masalah-masalah hidupnya. Kehidupan dunia saat ini dihadapkan pada pandemi yang terjadi secara global di dunia. Namun hidup harus terus berjalan dengan waktu dan amanah yang diberikan oleh Tuhan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk perkembangan, pertumbuhan, dan keterampilan perilaku (kepribadian) setiap individu (peserta didik) yang dilakukan melalui tiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah (Putra and Wajdi 2021). Seorang pemimpin yang dipercayakan kepemimpinannya dalam mengambil keputusan kebijakan pendidikan harus dijalankan dengan sistem manajemen pengembangan pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi individu dan khalayak agar dapat memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang diupayakan. memajukan pendidikan suatu negara. Apalagi dengan masalah pandemi global yang dihadapi oleh semua negara di dunia.

Era pandemi Covid-19 merupakan kondisi sulit yang dialami umat manusia secara global di dunia. Kondisi tersebut membuat manusia mengubah perilaku dan cara berpikirnya untuk menghadapi, mencegah, dan berinovasi dalam pola kehidupan yang baru. Padahal, kondisi ini menggambarkan pembelajaran masa depan yang selalu menggunakan teknologi. Dengan demikian, situasi ini mengubah para pembuat kebijakan di bidang pendidikan, pendidik, siswa, dan orang tua. Seorang pemimpin dalam posisi kepemimpinan dalam suatu organisasi, baik dalam skala mikro maupun makro di suatu negara, sangat dibutuhkan peran dan kontribusinya, terutama kepemimpinan yang

menaungi bidang pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri terkait dengan menerbitkan surat edaran (SE) sebagai acuan bagi masyarakat luas dalam beraktivitas di era pandemi. Pemimpin yang mengambil keputusan kebijakan dalam kepemimpinannya merupakan faktor penentu dalam manajemen pembangunan pendidikan. Kebijakan yang baik adalah tindakan yang harus segera diwujudkan untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam menjawab dan menghadapi tantangan, dan permasalahan, serta memberikan efek timbal balik. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh dalam mengembangkan kemajuan pembangunan pendidikan akan memberikan solusi.

Pemimpin yang berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan harus melihat dan merasakan kondisi pendidikan di kota-kota besar dan daerah pedesaan (pedesaan) Republik Indonesia yang jauh dari perkotaan. Perlu ada mobilisasi dan keterlibatan antara pimpinan pendidikan pusat dan daerah dalam mengatasi hal tersebut. Dengan adanya kebijakan pembelajaran online (in-network/online), diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk pembelajaran online. Karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dan kendala terkait koneksi internet. Bahkan ada yang harus berjalan berkilo-kilometer untuk mengikuti les online, ada yang mendaki bukit (pegunungan), dan ada juga yang pergi ke menara dan gedung-gedung tinggi untuk mendapatkan sinyal.

Perumusan kebijakan pendidikan memerlukan perencanaan yang matang agar tujuan yang ingin dicapai bermanfaat bagi banyak orang dan tidak sia-sia. Perencanaan adalah suatu konsep kegiatan yang disusun berdasarkan tahapan-tahapan suatu ide atau penggunaan ide mengoreksi kesalahan perencanaan yang terdahulu dalam memperoleh hasil dan tujuan akhir dari kegiatan yang mempunyai maksud, fungsi, dan manfaat untuk membuat suatu rancangan atau kegiatan yang relevan di masa depan (Wajdi 2021a). Strategi implementasi di tingkat sekolah dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu dicapai melalui partisipasi aktif dan dinamis orang tua, siswa, guru, dan lembaga yang peduli terhadap pendidikan sekolah (A. Rohman 2010). Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dari proses kebijakan. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan dan menegangkan (Hasbullah 2015). Sebagai ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan, dapat dilihat bagaimana implementasinya. Tindakan administratif sangat diperlukan dalam upaya melaksanakan kebijakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif SDM sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan: Pemimpin yang mendukung penuh inovasi bagi karyawannya dapat mempengaruhi munculnya perilaku kerja inovatif dalam organisasi. Dalam hal ini, pemimpin berkomunikasi secara efektif kepada karyawan untuk mentransfer konsep dan informasi yang terkait dengan pengetahuan dengan benar;
- 2) Karakteristik Pekerjaan: Karyawan yang terbiasa dan terbiasa dengan tugas-tugas yang ada akan mudah menemukan tips pekerjaan. Oleh karena itu, pengetahuan mudah diperoleh karyawan ketika dihadapkan pada tugas-tugas pekerjaan;
- 3) Grup dan Jaringan: Hubungan interpersonal yang baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam kelompok akan membuat karyawan merasa lebih aman untuk menyuarakan ide-ide terkait dengan pengetahuannya secara terbuka; dan
- 4) Visi dan Misi Bersama dalam Organisasi: Visi dan misi organisasi pembelajar yang mengarah pada manajemen pengetahuan dapat menciptakan budaya inovatif karyawannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama (Zhou and Velamuri 2018).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mengatasi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19, seperti revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang diterbitkan pada 7 Agustus 2020, hingga penyesuaian kebijakan pembelajaran di era pandemi (GTK 2020). Situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan (Hendayana 2020). Era pandemi Covid-19 dan adaptasi kehidupan baru membuat seorang pemimpin harus memutar otak, bergerak cepat, dan aktif dalam mengambil langkah dan tindakan berupa keputusan (kebijakan) atas kepemimpinan yang diembannya. Era pandemi membawa banyak dampak pada sektor-sektor penting, termasuk ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan. Di bidang pendidikan, tentunya para pemimpin di bidang ini, baik di tingkat pusat (Mendikbud) maupun di tingkat daerah (kepala dinas pendidikan) harus mengambil sikap dan bertindak di hadapan pandemi global ini. Sehingga pendidikan atau proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dunia sedang mengalami pandemi. Manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi khusus dalam bidang administrasi pendidikan yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan pelayanan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu dalam suatu lembaga yang mempekerjakan mereka dan semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. mereka ditujukan untuk memfasilitasi proses belajar/mengajar (Jones, J. J., & Walters 1994).

Permasalahan yang muncul dari siswa dan pendidik adalah bagaimana seharusnya pemimpin menyikapi permasalahan tersebut. Menteri pendidikan dan kebudayaan dan organisasi di bawahnya harus saling berkomunikasi dan bertindak atas situasi siswa dan pendidik. Pandemi Covid-19 menghadirkan permasalahan yang cukup kompleks bagi dunia pendidikan. Pasalnya, proses belajar mengajar di kelas terganggu. Dampak yang dihasilkan dari masalah ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang sedang berlangsung. Tidak hanya itu, efeknya juga diharapkan berdampak pada arah kebijakan pendidikan Indonesia beberapa tahun ke depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia tanpa pandemi Covid-19 sudah sangat besar, baik secara geografis, budaya, maupun infrastruktur (Ihsan 2020). Meski begitu, Kemendikbud akan terus berupaya merumuskan kebijakan terbaik agar pembelajaran tetap berjalan.

Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola organisasi karena kepemimpinan merupakan pengendali dalam setiap kegiatan, maka diperlukannya pengetahuan dalam mengelola organisasi (Wajdi 2022). Mengukur keberhasilan sistem reformasi kebijakan dalam konteks manajemen pembangunan pendidikan membutuhkan waktu (Irianto 2012). Pelaksanaan kebijakan ini harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya dan manusia seutuhnya. Pendidikan manusia seutuhnya mengandung makna bahwa kebijakan pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Implementasi kebijakan reformasi yang lebih arif dalam struktur pembangunan pendidikan sangat berarti karena fungsi dan peran pendidikan sangat strategis dalam pembangunan peradaban masyarakat dan bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa salah satu peran kepemimpinan pendidikan adalah mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, maju, cakap,

dan profesional. Peran dan kontribusi pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kebijakan pendidikan di era pandemi yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan dengan mengantisipasi pendidik dan peserta didik belajar di rumah, mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan, serta memberikan bantuan berupa kuota internet gratis, bantuan gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terpenting juga ada penyesuaian uang UKT (SPP) untuk peserta didik. Meskipun ada pendidik dan peserta didik yang tidak menerima bantuan ini secara merata dan mengeluhkan kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran secara keseluruhan sehingga terkendala masalah jaringan internet dan ekonomi keluarga.

Referensi

- A. Rohman, T. Wiyono. 2010. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Aksara.
- Arwildayanto, A. Suing, W. T. Sumar. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, Dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Asrijanty, Asrijanty. 2019. "Hubungan Akreditasi Sekolah, Hasil Ujian Nasional, Dan Indeks Integritas Ujian Nasional." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 4(1):1–14. doi: 10.24832/jpnk.v4i1.732.
- Danim, Sudarwan. 2012. *Kepemimpinan Pendidikan: Kepemimpinan Jenius (IQ + EQ), Etika, Perilaku Motivasional, Dan Mitos*. Bandung: Alfabeta.
- Darmalaksana, Wahyudin, R. Yuli Ahmad Hambali, Ali Masrur, and Muhlas. 2020. "Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 Sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21." *Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020* 1(1):1–12.
- Dunn, W. N. 2017. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th Editio. New York: Routledge.
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, Dan Pembebasan*, Ed. Ke-6. *Terjemahan: Agung Prihantoro Dan Fuad Arif Fudiyartanto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. 2008. *Pendidikan Sebagai Proses*, Ed. Ke-3. *Terjemahan: Agung Prihantoro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaol, N. T. L. 2017. "Teori Dan Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4(2):213–19. doi: 10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p213-219.
- GTK, Sekretariat. 2020. "Kebijakan Kemendikbud Di Masa Pandemi." *Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Retrieved ([https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi#:~:text=Sejak Maret 2020%2C Kemendikbud telah,di masa pandemi Covid-19.&text=Kemendikbud juga akan memberikan bantuan,\(September s.d. Desember 2020\).](https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi#:~:text=Sejak Maret 2020%2C Kemendikbud telah,di masa pandemi Covid-19.&text=Kemendikbud juga akan memberikan bantuan,(September s.d. Desember 2020).)).
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hastuti, Tri Puji, and Soehartono Soehartono. 2018. "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik." *Jurnal Jurisprudence* 8(1):34–41. doi: 10.23917/jurisprudence.v8i1.6293.
- Hendayana, Yayat. 2020. "Tantangan Dunia Pendidikan Di Masa Pandemi." *Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Retrieved (<http://www.dikti.kemdikbud.go.id/kabar->

- dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi/).
- Ihsan, Dian. 2020. "Mendikbud Susun Kebijakan Pembelajaran Terbaik Di Masa Pandemi." *Kompas.Com*. Retrieved (<https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/11/182639071/mendikbud-susun-kebijakan-pembelajaran-terbaik-di-masa-pandemi>).
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model*. cet ke-2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jones, J. J., & Walters, D. L. 1994. *Human Resource Management in Education*. Technomic Publishing Company.
- Krisna, Fransisca Nur'aini, Etty Sisidiana, Etty Sofyatiningrum, and Erni Hariyanti. 2020. "Kebijakan Pembelajaran Bermuatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Dalam K-2013: Perspektif Politik Ekonomi Higher." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5(1):43-58. doi: 10.24832/jpnk.v5i1.1513.
- Lestari, Andriani. 2016. "Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Strategik Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat." *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI* 23(1):114-29. doi: 10.17509/jap.v23i1.5580.
- M. Solichin. 2015. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6(2):148-78.
- Makawimbang, Jerry H. 2012. *Kepemimpinan Pendidikan Yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta.
- Maskuri, Maskuri. 2017. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Dalam Sistem Politik Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2(1):78-91. doi: 10.35316/jpii.v2i1.64.
- Matteson., J. M. Ivancevich; R. Konopaske; M. T. 2014. *Organizational Behavior and Management*. Tenth Edit. New York: McGraw-Hill Companies.
- Narwoko, D., & Bagong, S. 2006. *Sociology of Introduction and Applied Texts*. Jakarta: Kencana.
- Northouse, P. G. 2021. *Leadership: Theory and Practice*. SAGE Publications, Incorporated.
- Praptowo, Bagus Dwi, Mikhriani, and Agus Suharsono. 2020. "Keterlibatan Siklus Terintegrasi Knowledge Management Terhadap Perilaku Kerja Inovatif Sumber Daya Manusia Di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta." *Jurnal Borneo Administrator* 16(1):1-22. doi: <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.588>.
- Pujiati, A., J. J. Sarungu, and A. M. Soesilo. 2017. "Kontribusi Kepemimpinan Dan Tata Kelola Kota Terhadap Kota Berkelanjutan." *Proceeding Bingkai Manajemen (BIMA)* 1(1):416-29.
- Purwanto, Ngalm. 2010. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Cet ke-20. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putra, Z., and F. Wajdi. 2021. "Implementation of Leadership Values in Pancasila Paradigm as Character Building Values." *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* 4(4):45-52. doi: <https://doi.org/10.20961/shes.v4i4.50584>.
- Raharjo, S. B., Lia Yuliana, and Yusuf Hadi Yudha. 2018. "Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Achievement of National Standards of Education As a Predictor." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3(2):129-40. doi: 10.24832/jpnk.v3i2.750.
- Rivai, V. 2004. *Performance Appraisal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. 2007. "Perilaku Organisasi Buku 1, Terj." *Jakarta: Salemba Empat*.
- Santiari, Luh Putu, I. Gusti Ketut Arya Sunu, and Kadek Rihendra Dantes. 2020. "Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja

- Guru." *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* 11(1):1–10. doi: 10.23887/japi.v11i1.3149.
- Setiawan, Awang. 2016. "Kontribusi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Iklim Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah." *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI* 23(1):130–40. doi: 10.17509/jap.v23i1.5581.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhardono, Edy. 2016. *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukayana, I. Wayan, Made Yudana, and Dewa Gede Hendra Divayana. 2019. "Kontribusi Kepemimpinan Transformasional, Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Kompetensi Pedagogik Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SMK Kertha Wisata Denpasar." *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* 10(2):157–62. doi: 10.23887/japi.v10i2.2804.
- Sutapa, M. 2008. "Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2(4):12–16.
- Syam, E. B., P. N. S. Pascawati, and H. Sjahrudin. 2020. "Kontribusi Dimensi Gaya Kepemimpinan Islami Pada Kinerja Guru." *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas* 22(2):210–20. doi: <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.134>.
- Thoha, Miftah. 2014. "Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya, Cetakan Ke-23." Jakarta: Rajawali Pers.
- Tilome, A. A., and A. K. Masaong. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Multiple Intelligence*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu, Leonardus, and Wasono Mihadjo. 2018. "Does Digital Leadership Impact Directly or Indirectly on Dynamic Capability: Case on Indonesia Telecommunication Industry in Digital Transformation?" *The Journal of Social Sciences Research (SPI 2)*:832–41. doi: 10.32861/jssr.spi2.832.841.
- Wahyuni, Devi. 2017. "Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Dalam Pendidikan Islam: Refleksi Atas Kepemimpinan Rky Rahmah El Yunisyah." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 3(1):39–49. doi: 10.30983/islam_realitas.v3i1.273.
- Wajdi, F. 2021a. *Buku Ajar Perencanaan Pengajaran Panduan Di Perguruan Tinggi*. Malang: Ahlimedia Press.
- Wajdi, F. 2021b. "Manajemen Perkembangan Siswa SD Melalui Peran Guru Dan Orang Tua Pada Masa Pandemi." *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 4(1):41–50. doi: 10.17977/um027v4i12021p41.
- Wajdi, F. 2022. "Organizational Leadership Management Through Pancasila Values in Character Building." *Atlantis Press* 636(Acec 2021):112–17. doi: 10.2991/assehr.k.220108.020.
- Wajdi, F., and Z. Putra. 2020. "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Nilai Kearifan Lokal Etnis Bajo Dalam Satuan Pendidikan." Pp. 63–77 in *Prosiding Simposium Nasional Filsafat Nusantara Ke-1 (Eksplorasi Kekayaan Filsafat dan Kearifan Lokal Nusantara dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju)*, edited by H. Santoso. Yogyakarta: Laboratorium Filsafat Nusantara Universitas Gadjah Mada.
- Wajdi, F., and Z. Putra. 2021. "The Implementation of Elementary Student Character Values Among the Bajo Tribe through Pancasila Values as Character Building." *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* 4(4):95–104. doi: <https://doi.org/10.20961/shes.v4i4.50591>.
- Wilder-Smith, A., and D. O. Freedman. 2020. "Isolation, Quarantine, Social Distancing and Community Containment: Pivotal Role for Old-Style Public Health Measures in the Novel Coronavirus (2019-NCoV) Outbreak." *Journal of Travel Medicine* 27(2):1–4.

doi: 10.1093/jtm/taaa020.

- Winingsih, Lucia H. 2016. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kurikulum 2013." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 1(1):37-57. doi: 10.24832/jpnk.v1i1.226.
- Yuliana, Lia, and Sabar Budi Raharjo. 2019. "Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 4(2):197-212. doi: 10.24832/jpnk.v4i2.1457.
- Zhou, Wenqian, and Vivek K. Velamuri. 2018. "Key Contextual Success Factors for Employee Innovative Behavior: A Study in a Foreign Manufacturing Subsidiary in China." *Cogent Business and Management* 5(1):1-18. doi: 10.1080/23311975.2018.1471770.